

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

- Abdul Kadir, *Hukum Pengangkutan Darat, Laut, dan Udara*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Bandung, Alumni, 1982.
- Amirudin dan H Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004.
- Black's Law Dictionary, Eight Edition, West Publishing Co, 2004.
- Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 2007.
- Christopher W. Moore, *Mediasi Lingkungan*, Jakarta, Indonesian Center for Enviromental Law dan CDR Associates, 1995.
- Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013.
- Garry Goodpaster, *Negosiasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi*, Jakarta, ELIPS Project, 1993.
- _____, *Tinjauan Terhadap Penyelesaian Sengketa, dalam Seri Dasar-Dasar Hukum Ekonomi 2: Arbitrase di Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1996.
- Gunawan Wijaya, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2001.
- HB.Soetopo, *Pengantar Penelitian Kualitatif*, Surakarta, UNS Press, 2002.
- Huala Adolf, *Masalah-masalah Hukum dalam Perdagangan Internasional*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1999.
- Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya, Bayunedia Publishing, 2008.
- Junaedy Ganie, *Hukum Asuransi Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011.

- M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung, Alumni, 1986.
- M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum: Dictionary of Law Complete Edition*, Surabaya, Reality Publisher, 2009.
- Mr. J.H. Nieuwenhuis, terjemahan Djasadin Saragih, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Surabaya, Airlangga University Press, 1985.
- Mardjono Reksodiputro, *Pertanggung jawaban Pidana Korporasi dalam tindak Pidana Korporasi*, Semarang, Fakultas Hukum UNDIP, 1989.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2010.
- Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian dan Dari Undang-Undang)*, Bandung, Mandar Maju, 1994.
- Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa — Suatu Pengantar*, Jakarta, Fikahati Aneska, 2002.
- R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung, Bina Cipta, 1977.
- Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2013.
- Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Edisi Revisi*, Jakarta, Gramedia Widiasarana Indonesia, 2006.
- Setiono, *Pemahaman Terhadap Metodologi Penelitian Hukum*, Surakarta, Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Press, 2008.
- _____, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia*, Jakarta, UI-Press, 1983.
- Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Jakarta, Sinar Grafika, 1995.
- Sudargo Gautama, *Undang.Undang Arbitrase Baru 1999*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.

Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum : Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, 2004.

Sulistiyowati Irianto, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2009.

Susanti Adi Nugroho, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta, Telaga Ilmu Indonesia, 2009.

Suyud Margono, *ADR dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Bogor Ghalia Indonesia, 2004.

Taufik Hidayat, *Perkeretaapian Indonesia Di Persimpangan Jalan*, Jakarta, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), 2004.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 1988.

Tim Penyunting Kamus Hukum Ekonomi ELIPS, *Kamus Hukum Ekonomi ELIPS*, Jakarta, ELIPS Project, 1997.

Internet:

2013 Laporan Tahunan, <http://www.bumn.go.id/22517/publikasi/berita/misi-perkeretaapian-menyimpang-dari-uu-defisit-pt-kai-rp90-miliar-per-tahun/>>, diakses tanggal 26 April 2016.

<http://megapolitan.kompas.com/read/2013/12/30/1512175/Ini.Penyebab.Kecelakaan.KRL.di.Bintaro.Versi.KNKT>, diakses 28 April 2016.

<http://news.liputan6.com/read/772496/digugat-pt-kai-pertamina-sama-sama-bumn-fokus-ke-korban-dulu>., diakses pada tanggal 26 April 2016.

<http://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/13/12/12/mxozt6-pertamina-tanggapi-dingin-rencana-gugatan-perdata-pt-kai>., diakses pada tanggal 26 April 2016.

<https://m.tempo.co/read/news/2014/05/16/064578131/tragedi-bintaro-pertamina-berjanji-taati-knkt>., diakses pada tanggal 26 April 2016.

<http://megapolitan.kompas.com/read/2013/12/30/1512175/Ini.Penyebab.Kecelakaan.KRL.di.Bintaro.Versi.KNKT> , diakses 15 November 2014 jam 19:00.

<http://megapolitan.kompas.com/read/2013/12/30/1512175/Ini.Penyebab.Kecelakaan.KRL.di.Bintaro.Versi.KNKT> , diakses 15 November 2014 jam 19:00.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025).

Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358).

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Kereta Api.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2013 tentang Investigasi Kecelakaan Transportasi.